

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibentuk guna menginformasikan aktiva serta kewajiban yang dimiliki perusahaan atau perubahan yang terjadi pada periode tertentu menurut dari prinsip akuntansi yang berlaku (Mulyadi, 2002). Laporan keuangan dapat menunjukkan keadaan keuangan saat ini maupun periode tertentu (Kasmir, 2014). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang berisikan informasi ekonomi serta kewajiban perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini akan dapat menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada periode terlampir sehingga dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan guna mengambil keputusan bisnis.

2.1.1 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2014), tujuan laporan keuangan adalah:

1. Menginformasikan jumlah dan jenis aktiva milik perusahaan pada periode tertentu.
2. Menginformasikan jumlah dan jenis kewajiban dan modal milik perusahaan pada periode tertentu.
3. Menginformasikan jumlah dan jenis pendapatan yang diperoleh pada periode tertentu.
4. Menginformasikan jumlah dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu.

5. Menginformasikan perubahan yang ada atas aset, kewajiban, dan modal perusahaan.
6. Menginformasikan kinerja manajemen perusahaan.
7. Menginformasikan catatan-catatan atas laporan keuangan.

Dapat disimpulkan dari tujuan laporan keuangan tersebut, perusahaan dan pihak eksternal dapat mengetahui keadaan keuangan secara keseluruhan. Laporan keuangan yang dibuat juga akan menjadi bahan evaluasi kinerja manajemen atas efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan. Manajemen akan berupaya untuk menunjukkan laporan keuangan yang dapat memuaskan pihak internal dan eksternal perusahaan. Ketika manajemen tidak dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan, kecurangan dapat terjadi dan risiko perusahaan meningkat. Ketidakjujuran serta ketidakandalan pihak manajemen dan laporan keuangan, akan merugikan berbagai pihak yang menggunakan laporan tersebut dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu, sangatlah penting untuk meminimalisir perilaku kecurangan yang dapat dilakukan manajemen untuk memastikan laporan keuangan yang dibuat bebas dari manipulasi.

2.2 Kecurangan (*Fraud*)

2.2.1 Pengertian Kecurangan

Aktivitas dapat dikatakan *Fraud* ketika adanya aktivitas yang melawan hukum dan dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau menyajikan laporan keliru kepada pihak lain) dilakukan baik oleh orang dalam maupun luar organisasi guna mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan pihak lain (ACFE). *Fraud* dikatakan tindakan kriminal ketika terdapat tindakan untuk

mencari keuntungan yang tidak jujur serta melanggar hukum (Fahlevi, 2015). Sehingga, disimpulkan bahwa *fraud* adalah aktivitas yang dilakukan secara disengaja yang kemudian dapat memberikan keuntungan bagi pihak yang melakukan *fraud*. Segala perbuatan yang dapat menunjukkan adanya manipulasi atas keuangan suatu organisasi dapat dikatakan sebagai *fraud*.

2.2.3 Kecurangan Perusahaan (*Corporate Fraud*)

Kecurangan terbagi kedalam tiga jenis, kecurangan yang dilakukan terhadap individu, kecurangan yang dilakukan oleh internal perusahaan, dan kecurangan yang dilakukan oleh pihak eksternal (ACFE). Kegiatan *fraud* yang dilakukan oleh internal perusahaan (karyawan maupun manajemen) disebut sebagai *corporate fraud*. Zhao *et al.* (2021) berpendapat bahwa *corporate fraud* terjadi ketika orang dalam (pemegang saham pengendali, direktur perusahaan, atau manajemen) perusahaan terdaftar, melakukan tindakan oportunistik untuk memperoleh keuntungan pribadi. *Fraud* yang dilakukan menyebabkan perusahaan harus berhadapan dengan pihak berwenang dan terlibat dalam masalah hukum berkenaan dengan pelanggaran aturan yang berlaku, pelanggaran hukum perdata hingga pelanggaran hukum pidana (Zeng *et al.*, 2020). Menurut Chen (2022), kecurangan perusahaan berbentuk kompleks dan berdampak langsung pada perusahaan, karyawan, dan pihak eksternal. Terdapat berbagai bentuk kecurangan yang dapat dilakukan oleh perusahaan, karyawan maupun manajemen untuk memperoleh berbagai hal mulai dari penggelapan pajak hingga manipulasi laporan keuangan. Perusahaan dapat mengeluarkan produk yang tidak sesuai dengan aturan, manajemen dapat memanipulasi laba, dan karyawan dapat secara sengaja melakukan salah saji atas nominal produk yang keluar dari

gudang. Pada penelitian ini, peneliti menguji *corporate fraud* dengan menganalisis kecurangan laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.2.4 Kecurangan Laporan Keuangan

Menurut Elder *et al.* (2011), *fraud* laporan keuangan adalah salah saji atau penghapusan terhadap jumlah ataupun pengungkapan, yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para penggunanya. *Fraud* dalam laporan keuangan terjadi karena adanya kesengajaan yang dilakukan dalam menyajikan laporan keuangan. Upaya penyajian yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, menunjukkan adanya *fraud* pada laporan keuangan. Terdapat 3 hal yang dapat menyebabkan *fraud* dalam penyajian laporan keuangan yaitu (Rini dan Achmad, 2012):

1. Falsifikasi, manipulasi, dan alterasi dari catatan akuntansi serta dokumen pendukung terhadap laporan keuangan yang tersaji.
2. Salah saji (*misrepresentation*) atau salah informasi signifikan di dalam laporan keuangan.
3. Salah dalam menerapkan (*misapplication*) prinsip akuntansi, berhubungan langsung terhadap jumlah, klasifikasi, penyajian serta pengungkapan.

Dalam penelitian ini, kecurangan laporan keuangan digunakan untuk mengukur *corporate fraud*. Kecurangan laporan keuangan diukur dengan menggunakan *Beneish M-Score*. Pengukuran ini ditujukan untuk mengetahui apakah perusahaan melakukan manipulasi atau tidak pada laporannya (Ghozali dan Annisa,

2020). Terdapat delapan rasio yang akan digunakan untuk mengukur *Beneish M-Score* perusahaan yaitu (Ghozali dan Annisa, 2020):

1. *Days Sales in Receivable Index (DSRI)*

$$DSRI = \frac{\text{Piutang Usaha}(t) / \text{Penjualan}(t)}{\text{Piutang Usaha}(t-1) / \text{Penjualan}(t-1)}$$

2. *Gross Margin Index (GMI)*

$$GMI = \frac{\frac{\text{Penjualan}(t-1) - \text{Harga Pokok Penjualan}(t-1)}{\text{Penjualan}(t-1)}}{\frac{\text{Penjualan}(t) - \text{Harga Pokok Penjualan}(t)}{\text{Penjualan}(t)}}$$

3. *Asset Quality Index (AQI)*

$$AQI = \frac{1 - \frac{\text{Aset Lancar}(t) + \text{Aset Tetap}(t)}{\text{Total Aset}(t)}}{1 - \frac{\text{Aset Lancar}(t-1) + \text{Aset Tetap}(t-1)}{\text{Total Aset}(t-1)}}$$

4. *Sales Growth Index (SGI)*

$$SGI = \frac{\text{Penjualan}(t)}{\text{Penjualan}(t-1)}$$

5. *Depreciation Index (DEPI)*

$$DEPI = \frac{\frac{\text{Depresiasi}(t-1)}{\text{Depresiasi}(t-1) + \text{Aset Tetap}(t-1)}}{\frac{\text{Depresiasi}(t)}{\text{Depresiasi}(t) + \text{Aset Tetap}(t)}}$$

6. *Selling General and Administrative Expense Index (SGAI)*

$$SGAI = \frac{\frac{\text{Biaya Penjualan dan Adm (t)}}{\text{Penjualan (t)}}}{\frac{\text{Biaya Penjualan dan Adm (t-1)}}{\text{Penjualan (t-1)}}}$$

7. *Total Accrual to Total Asset (TATA)*

$$TATA = \frac{\text{EAT} - \text{Arus Kas Aktivitas Operasi(t)}}{\text{Total Aset(t)}}$$

8. *Leverage Index (LVGI)*

$$LVGI = \frac{\frac{\text{Total Kewajiban (t)}}{\text{Total Aset(t)}}}{\frac{\text{Total Kewajiban (t-1)}}{\text{Total Aset (t-1)}}}$$

9. Setelah menghitung seluruh rasio diatas, selanjutnya *Beneish M-Score* dapat dihitung dengan menggunakan:

$$M\text{-Score} = \alpha + \beta_1 DSRI + \beta_2 GMI + \beta_3 AQI + \beta_4 SGI + \beta_5 DEPI - \beta_6 SGAI + \beta_7 TATA - \beta_8 LVGI$$

Berdasarkan hasil yang didapat, akan disimpulkan jika perusahaan memiliki nilai M-Score lebih besar dari -2,2 maka perusahaan tersebut diasumsikan melakukan *fraud* dan diberi kode 1. Sebaliknya, perusahaan dengan M-Score lebih kecil dari -2,2 diberi kode 0 (Ghozali dan Annisa, 2020).

2.3 *Evasive Shareholder Meetings*

Menurut UU No. 40 Tahun 2007, Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Di Indonesia, RUPS terbagi kedalam dua jenis yaitu, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST),

dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) atau RUPS lain-lain. Kegiatan RUPST wajib dilaksanakan paling lambat enam bulan setelah tutup buku perusahaan, sedangkan RUPSLB dapat dilaksanakan kapan saja sesuai dengan kebutuhan. RUPS diadakan dengan tujuan memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk ikut terlibat di dalam perusahaan. Pada UU No. 40 Tahun 2007, terdapat banyak aturan yang mengharuskan adanya persetujuan dari pemegang saham sebelum perusahaan dapat melakukan hal-hal tertentu. Persetujuan yang dimaksud berupa pengesahan laporan keuangan tahunan, pengesahan penambahan atau pembelian kembali saham, pengangkatan dan pemberhentian dewan direksi dan dewan komisaris, penetapan gaji dan honorarium, penetapan anggaran dasar, penunjukan eksternal auditor, serta persetujuan perusahaan menyatakan pailit (UU No. 40 Tahun 2007).

Wewenang yang dimiliki oleh pemegang saham untuk menyetujui berbagai persoalan diatas kemudian dapat menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan perusahaan. Manajemen yang melakukan *fraud* akan berusaha untuk menyembunyikan informasi *fraud* yang dilakukan (Gam *et al.*, 2021). Sifat RUPST yang berbentuk wajib, membuat manajemen menetapkan strategi penjadwalan RUPST yang menguntungkan dirinya dan secara efektif dapat menghindari pemegang saham (Gam *et al.*, 2021). Manajemen yang berusaha menghindari atau mencegah pemegang saham dalam pengambilan keputusan tertentu, dapat melakukan *evasive shareholder meetings*. Dapat disimpulkan bahwa, *evasive shareholder meetings* adalah strategi penjadwalan RUPST yang dilakukan

manajemen untuk menghindari atau mencegah pemegang saham dalam pengambilan keputusan tertentu.

Kegiatan penghindaran RUPST terbagi menjadi dua yaitu, menjadwalkan RUPST pada tanggal-tanggal populer (*clustering dates*) dan mengganti jadwal RUPS ke tanggal yang sama dengan perusahaan lain (*switcher*) (Gam *et al.*, 2021). Kasus penjadwalan RUPST pada tanggal populer ini terjadi di Korea Selatan, dimana terdapat 542 perusahaan dengan tahun tutup buku 31 Desember melakukan RUPST mereka pada tanggal 23 Maret 2018 (Song, 2018). Perlu diketahui bahwa, badan pengatur keuangan Korea Selatan telah mewajibkan penggunaan *electronic voting system (e-voting)* pada tahun 2014 disaat berita ini dipublikasikan. Di Indonesia implementasi penggunaan *e-voting system* baru dilakukan pada tanggal 28 Juni 2021, setelah tanggal 18 Mei 2020 PT Kustodian Sentrak Efek Indonesia (KSEI) merilis platform RUPS dengan modul *e-proxy*. Rilisnya *e-voting system* ditujukan untuk memberikan akses kepada pemegang saham untuk berpartisipasi secara online ditengah pandemi COVID-19, terlebih bagi mereka yang berada diluar Jakarta dan memiliki saham lebih dari satu (KSEI News, 2021).

Dalam penelitian ini, *evasive shareholder meetings* diukur menggunakan variabel *dummy* dimana jika perusahaan menjadwalkan RUPST mereka pada tanggal *clustering* diberi kode 1. Sebaliknya, jika perusahaan tidak menjadwalkan RUPST mereka pada tanggal *clustering* diberi kode 0 (Gam *et al.*, 2021). Penentuan tanggal *clustering* dalam penelitian ini disesuaikan dengan negara penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut (Gam *et al.*, 2021):

1. Mengumpulkan tanggal pelaksanaan RUPST tahun 2017-2021.
2. Mengelompokkan tanggal pelaksanaan RUPST kedalam minggu (Minggu 1-52) RUPST tersebut dilakukan.
3. Menetapkan tiga minggu terjadinya *clustering* dari masing-masing tahun penelitian dimana:
 - a. Pada tahun 2017, dipilih minggu pertama, kedua, dan ketiga bulan Juni. Minggu keempat tidak dipilih karena adanya libur nasional Idul Fitri dan cuti bersama.
 - b. Pada tahun 2018, dipilih minggu pertama, ketiga, dan keempat bulan Juni. Minggu kedua tidak dipilih karena adanya libur nasional Idul Fitri dan cuti bersama.
 - c. Pada tahun 2019, dipilih minggu kedua, ketiga dan keempat bulan Juni. Minggu pertama tidak dipilih karena adanya libur nasional Idul Fitri dan cuti bersama.
 - d. Pada tahun 2020, dipilih minggu kedua, ketiga dan keempat bulan Agustus.
 - e. Pada tahun 2021, dipilih minggu kedua, ketiga dan keempat bulan Agustus.
4. Menetapkan bulan Juni dan bulan Agustus sebagai bulan *clustering*. Bulan Juni dipilih karena bulan Juni merupakan bulan terakhir pelaksanaan RUPST untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember. Sementara, bulan Agustus dipilih karena OJK memperpanjang waktu pelaksanaan RUPST dari 30 Juni menjadi 31 Agustus 2020 akibat pandemi COVID-19 (Siaran Pers, 2020).

5. Perusahaan dianggap melakukan *clustering* jika, perusahaan menjadwalkan RUPST mereka pada tanggal-tanggal dimana setidaknya ada 10% perusahaan pada tahun sampel yang sama menjadwalkan RUPST mereka.

2.4 Multiple Large Shareholders

Adelopo *et al.* (2019) mendeskripsikan *multiple large shareholders* sebagai

“situasi pada perusahaan terdaftar, dimana terdapat lebih dari satu pemegang saham dengan kepemilikan substansial atas modal saham yang diterbitkan perusahaan.”

Struktur kepemilikan pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi tingkat pengawasan serta keputusan bisnis yang akan diambil. Struktur kepemilikan perusahaan yang dikuasai oleh satu pemegang saham besar yang biasanya juga merupakan pemegang saham pengendali, akan memunculkan adanya konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas (Zhao *et al.*, 2021). Konflik kepentingan yang dimaksud disebut “*tunneling*”. Tujuan dilakukannya *tunneling* adalah untuk memuaskan kepentingan pribadi pemegang saham pengendali dengan cara menyalurkan aset perusahaan keluar dari perusahaan (Sari dan Sugiharto, 2014).

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa keberadaan MLS dapat mengurangi konflik kepentingan dan *fraud* (khususnya *fraud* pengungkapan informasi) pada perusahaan (Zhao *et al.*, 2021). Selain itu, keberadaan MLS juga dapat meningkatkan nilai perusahaan, *good corporate governance*, dan kinerja perusahaan (Jeong dan Piao, 2019), (Attig *et al.*, 2009), (Yulistiani, 2021). Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa keberadaan MLS di dalam suatu perusahaan dapat mengurangi adanya benturan kepentingan,

meningkatkan transparansi informasi, serta meningkatkan *good corporate governances*. Di sisi lain, keberadaan *multiple large shareholders* juga dapat membawa dampak negatif bagi perusahaan dan pemegang saham minoritas. Hal ini didasari oleh hipotesis kolusi dimana MLS berkolusi memprioritaskan perolehan keuntungan pribadi dibandingkan kepentingan pemegang saham lainnya (Zhao *et al.*, 2021). Keberadaan MLS dalam mengawasi manajemen dan pemegang saham pengendali menjadi tidak efektif dan meningkatkan terjadinya *corporate fraud*. Dalam penelitian ini, *multiple large shareholders* diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, kode 1 jika perusahaan memiliki 2 atau lebih pemegang saham besar dalam satu tahun, dan 0 sebaliknya.

2.5 Variabel Kontrol

2.5.1 Profitabilitas

Profitabilitas digunakan sebagai variabel kontrol karena perusahaan bergantung pada laba dan dapat mengukur kinerja manajemen dalam kegiatan operasional perusahaan (Zhao *et al.*, 2021), (Sukamulja, 2019). Menurut Sukamulja (2019), rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengukur tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan. Menurut Arnold dan Lewis (2018), manajer akan berupaya menciptakan kekayaan jangka panjang untuk memuaskan ekspektasi pemegang saham. Tekanan untuk memuaskan pemegang saham dapat memaksa manajer melakukan tindak kecurangan. Profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan adanya indikasi manajemen mengalami tekanan untuk mengejar target keuangan yang ditetapkan.

Profitabilitas diukur menggunakan *return on asset* (ROA). Menurut Sukamulja (2019), *return on asset* mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki. Kemampuan perusahaan mengelola asetnya menunjukkan efisiensi manajemen menghasilkan laba. Hargrave (2022), berpendapat semakin tinggi nilai ROA, semakin baik karena perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak uang dengan investasi yang lebih kecil (efisiensi aset). Rumus yang digunakan untuk menghitung profitabilitas (Sukamulja, 2019):

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2.5.2 Leverage

Leverage atau solvabilitas merupakan rasio yang dapat menunjukkan risiko jangka panjang perusahaan, dilihat dari proporsi utang yang mendanai aktiva perusahaan (Sukamulja, 2019). *Leverage* perusahaan diukur dengan menggunakan perbandingan total utang terhadap total aktiva perusahaan atau *debt to asset ratio* (DAR) (Sukamulja, 2019). DAR dapat menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang menggunakan utang atau seberapa besar pengelolaan aktiva dipengaruhi oleh utang yang dimiliki (Kasmir, 2017). *Leverage* digunakan sebagai variabel kontrol, karena dapat menunjukkan tekanan yang dialami manajemen untuk melakukan tindak kecurangan (Zhao *et al.*, 2021). Tekanan yang berlebihan terhadap manajemen untuk dapat memperoleh pinjaman ataupun memenuhi persyaratan pihak ketiga akan dapat memicu kecurangan laporan keuangan (SAS No. 99).

Nilai DAR yang besar memiliki kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Menurut Sukamulja (2019), semakin tinggi rasio ini semakin tinggi risiko

bisnis. Hal ini dikarenakan, perusahaan harus berupaya keras untuk dapat mengubah aset tersebut menjadi pendapatan agar dapat membayar utang yang telah diambil. Ketika perusahaan tidak dapat menghasilkan pendapatan maka utang tersebut tidak dapat dibayarkan. Pemberi pinjaman dapat memaksa perusahaan untuk melikuidasi asetnya agar dapat membayar utang dan bunga tersebut (Arnold dan Lewis, 2019). Zhao *et al.* (2021) berpendapat perusahaan akan berupaya untuk menghindari mengungkapkan informasi utang yang memiliki tekanan pembayaran berlebih atau bahkan mengungkapkan informasi palsu. Rumus yang digunakan untuk menghitung *leverage* (Zhao *et al.*, 2021):

$$\text{LEV} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

2.5.2 Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Menurut Basyaib (2007), ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total modal. Klasifikasi besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi keputusan finansial dan non-finansial yang akan diambil baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Pada umumnya, perusahaan besar telah memiliki reputasi, kerangka bisnis dan struktur keuangan yang lebih stabil dibandingkan perusahaan kecil. Embong *et al.* (2012) dalam Teguh dan Kristanto (2020) berpendapat bahwa perusahaan besar akan mengungkapkan lebih banyak informasi untuk menjaga reputasi mereka. Selain itu, perusahaan besar akan lebih memperhatikan kontrol internal yang dimiliki sehingga dapat meminimalisir *fraud* (Teguh dan Kristanto, 2020). Pihak eksternal akan

memperhatikan hal diatas saat ingin memberikan pinjaman, menanamkan modal, atau membeli produk. Dapat disimpulkan, ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kesempatan perusahaan untuk berkembang dan memperoleh pendanaan.

Ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol karena efeknya yang dapat mempengaruhi keputusan investor dan kemungkinan mendeteksi *fraud* (Zhao *et al.*, 2021). Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur menggunakan total aset. Menurut Murhadi (2013), *firm size* diukur dengan mentransformasikan total aset yang dimiliki perusahaan ke dalam bentuk *logaritma natural*. Aset yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasionalnya, dapat menunjukkan perkembangan bisnis perusahaan. Perusahaan dengan nilai aset besar menunjukkan kemajuan bisnis dan meningkatkan kesempatan memperoleh pendanaan. Tekanan dan ekspektasi yang harus dihadapi perusahaan, dapat membuat manajemen memanipulasi nilai aset perusahaan. Rumus untuk menghitung ukuran perusahaan (Murhadi, 2013):

$$\text{SIZE} = \text{Ln} (\text{Total Aktiva})$$

2.5.3 Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big 4*

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) mendefinisikan KAP sebagai

“badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.”

Jasa yang diberikan auditor eksternal memegang peranan penting dalam mendeteksi *fraud* dan meningkatkan keyakinan dan kepercayaan pihak berkepentingan suatu perusahaan. Perusahaan yang memegang teguh prinsip *good corporate governance* akan mempekerjakan kantor akuntan publik (KAP) terpercaya. Memastikan laporan

keuangan yang akan dipublikasikan menggunakan aturan yang berlaku dan dapat memberikan keyakinan memadai adalah tujuan dari dibutuhkannya auditor eksternal. KAP *Big 4* digunakan sebagai variabel kontrol karena perannya dalam pengawasan eksternal dan pencegahan *corporate fraud* (Zhao *et al.*, 2021). Teguh dan Kristanto (2020) berpendapat

“jika KAP besar memberikan laporan audit berkualitas rendah, mereka akan kehilangan reputasi dan kepercayaan, sehingga mereka akan memberikan laporan audit yang berkualitas baik.”

Menurut Chi *et al.* (2012), terdapat perbedaan diantara KAP *Big 4* dan KAP non-*Big 4* yaitu:

1. KAP *Big 4* memiliki reputasi tinggi yang harus dijaga.
2. KAP *Big 4* memiliki tenaga ahli terlatih dan teknologi yang dapat memungkinkan mereka mendeteksi penyimpangan laporan keuangan lebih baik.
3. Partner audit individual mungkin lebih kuat daripada KAP non-*Big 4* karena kualitas sistem pengendalian KAP lebih mungkin tidak ada atau tidak efektif.

Di Indonesia, terdapat 4 kantor akuntan publik besar yang dapat dipekerjakan oleh perusahaan, yaitu Deloitte, PwC, EY, dan KPMG. Dalam penelitian ini, variabel kontrol *Big 4* diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, kode 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP *Big 4*, kode 0 sebaliknya.

2.6 Teori Agensi

Teori agensi digunakan untuk menjelaskan hubungan dan kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi perusahaan (Schroeder *et al.*, 2019). Hubungan serta kepentingan di dalam perusahaan biasanya akan menimbulkan permasalahan.

Jeong dan Piao (2019) berpendapat terdapat dua permasalahan yang harus diselesaikan yaitu permasalahan antara pemegang saham dan manajer, dan permasalahan diantara pemegang saham. Menurut Adelopo *et al.* (2019), teori agensi menjelaskan struktur dan justifikasi dari pentingnya mekanisme pengendalian di dalam perusahaan. Melihat dari struktur perusahaan terdapat hubungan antara *principal-agent* dan *principal-principal* yang dapat mempengaruhi tata kelola perusahaan.

Dalam hubungan *principal-agent*, *principal* memanfaatkan jasa *agent* untuk mewakili dirinya dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka (Schroeder *et al.*, 2019). Dalam melakukan tugasnya, *agent* terikat dalam kontrak dengan *principal* untuk mengelola perusahaan atas nama *principal* dan demi kepentingan *principal* (Jensen dan Meckling, 1976). Namun, tidak semua *agent* memiliki kepentingan yang sama dengan *principal* mereka. Ketika *agent* memilih untuk bertindak demi kepentingannya, akan muncul *cost* yang harus dibayar *principal* untuk mengawasi *agent* dan perusahaan. Dalam hubungan *principal-principal*, tidak terdapat kontrak yang dapat mengikat dan mencegah masing-masing pemegang saham untuk memiliki agendanya sendiri. Masalah keagenan ini timbul saat pemegang saham minoritas merasa dirugikan akibat tindakan atau keputusan yang diambil pemegang saham mayoritas. *Cost* yang ditimbulkan dari pemegang saham mayoritas, dapat menyebabkan pemegang saham minoritas tidak dapat menerima dan menggunakan haknya secara maksimal.

Menurut Kapil (2015), *agency cost* adalah *cost* yang berhubungan dengan aktivitas keuangan pemilik untuk mengendalikan dan mengawasi manajemen.

Masalah keagenan dalam penelitian ini, muncul dari berbagai praktik *fraud* yang dapat dilakukan manajemen terhadap pemegang saham. Manajemen selaku pengelola perusahaan memiliki kewenangan serta informasi lebih dibandingkan pemegang saham. Kewenangan untuk menetapkan jadwal RUPS dapat menimbulkan *cost* bagi pemegang saham. Praktik penghindaran RUPS ini akan menyebabkan pemegang saham harus menerima *cost* tidak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan akibat manajer yang *fraud*.

2.7 Hubungan Antar Variabel

2.7.1 Hubungan *Evasive Shareholder Meetings* dan *Corporate Fraud*

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu bentuk kegiatan tata kelola yang wajib dilakukan perusahaan. Pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dan menggunakan informasi perusahaan untuk mengawasi dan memberikan suaranya pada agenda yang dapat mempengaruhi investasinya. RUPS merupakan fasilitas yang dapat digunakan pemegang saham untuk menyuarakan kekhawatiran dan keinginan yang dimiliki atas perusahaan. Tingkat kepuasan pemegang saham atas kinerja perusahaan, merupakan tekanan bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja dan/atau melakukan perbaikan. Manajemen yang memiliki agenda berbeda akan memprioritaskan dirinya di atas kepentingan pemegang saham.

Menurut Samat dan Ali (2015), RUPS seharusnya tidak diadakan hanya sekedar sebagai formalitas, tapi diperlakukan sebagai pertemuan yang produktif. Tujuan utama diadakannya RUPS adalah untuk mengevaluasi proses tata kelola

perusahaan. Melalui RUPS, pemegang saham dapat memahami dan memutuskan hal-hal penting yang memerlukan perhatian lebih dari manajemen. Perbaikan atas kinerja perusahaan seharusnya merupakan agenda yang sejalan dengan kepentingan manajemen. Namun, tidak semua manajemen perusahaan memiliki pemikiran yang sama dengan pemegang saham.

Beberapa manajemen, menganggap RUPS sebagai penghalang dalam menjalankan agendanya. Manajemen yang melakukan praktik *fraud* akan melakukan berbagai cara agar dapat menghalangi pemegang saham mengetahui dan menindaklanjuti praktik *fraud* yang dilakukan. Menghalangi pemegang saham berpartisipasi dalam RUPS, merupakan praktik manajemen untuk menghindari pemegang saham dari pengambilan keputusan tertentu yang dapat mempengaruhi manajemen. Ketika banyak perusahaan menetapkan jadwal RUPS di hari yang sama, pemegang saham akan dihadapkan pada pilihan untuk berpartisipasi atau tidak di perusahaan.

2.7.2 Hubungan *Multiple Large Shareholders* dan *Corporate Fraud*

Masing-masing pemegang saham memiliki agenda tersendiri terhadap perusahaan. Umumnya agenda yang dimaksud adalah memastikan perolehan keuntungan dari investasi yang dilakukan. Pemegang saham pengendali memiliki kekuatan untuk mengendalikan perolehan keuntungannya. Ia dapat menggunakan haknya dalam memutuskan kebijakan perusahaan atau kesempatan bisnis yang dapat menguntungkan dirinya. Beberapa penelitian sebelumnya berpendapat, negara yang memiliki hukum perlindungan yang lemah terhadap pemegang saham minoritasnya

akan lebih mungkin dihadapkan pada pemegang saham pengendali yang melakukan ekspropriasi terhadap hak pemegang saham minoritas (Khamis, 2015), (Lestari dan Juliarto, 2017). Konflik kepentingan diantara pemegang saham ini akan menimbulkan masalah agensi, menghambat proses tata kelola perusahaan dan merugikan berbagai pihak.

Keberadaan *multiple large shareholders* (MLS) dalam suatu perusahaan dapat meringankan masalah agensi yang terjadi diantara pemegang saham mayoritas dan minoritas serta meningkatkan proses tata kelola perusahaan. Keberadaan MLS di perusahaan memiliki kekuatan tawar menawar untuk menyaingi pengaruh pemegang saham pengendali dan menekankan kebutuhan akan pengawasan atas investasi di perusahaan (Attig *et al.*, 2013). Hasilnya, pemegang saham pengendali akan berupaya untuk mengawasi dan mengendalikan perusahaan agar tidak terpengaruh MLS. Keselarasan kepentingan diantara pemegang saham tercapai dan akan menghambat praktik *fraud* yang akan dilakukan pemegang saham pengendali dan manajemen.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan 2 penelitian terdahulu sebagai rujukan utama penelitian. Penelitian pertama dilakukan oleh Gam *et al.* (2021). Penelitian ini menggunakan 7054 data dari perusahaan yang terdaftar pada Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) pada tahun 2009-2014 sebagai subjek penelitian. Pada penelitian ini *Corporate Fraud* sebagai variabel dependen diukur dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan *fraud* yaitu jumlah fraud yang terjadi terdiri dari penggelapan, pelanggaran kepercayaan, transaksi internal, kolusi,

perdagangan tidak sehat, penghindaran pajak, akuntansi, dan kecurangan pengungkapan di setiap tahun sampel, kemudian dikategorikan kedalam tiga ukuran sanksi yaitu perintah koreksi, pengenaan denda, dan penuntutan dilihat dari tingkat keparahannya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Evasive Shareholder Meetings* yang diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Pengukuran ini membagi perusahaan kedalam dua kategori yaitu cluster 1 dan switcher. Cluster 1 adalah perusahaan yang mengumumkan RUPS pada tanggal *clustering* pada tahun penelitian. Sedangkan, Switcher adalah perusahaan yang termasuk kedalam dua tipe perusahaan yang mengganti kebijakan RUPS mereka. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yang terdiri dari Ukuran Perusahaan yang diukur menggunakan rasio total aset, *Leverage* diukur menggunakan rasio utang, Profitabilitas Perusahaan yaitu rasio pengembalian aset, Umur Perusahaan diukur menggunakan jumlah tahun sejak perusahaan didirikan, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Terbesar, *Market Share*, Tobin's Q, dan Indikator ADR. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan metode *ordinary least square*. Hasil dari penelitian ini adalah *evasive shareholder meetings* berpengaruh positif terhadap kemungkinan terjadinya *corporate fraud*.

Penelitian kedua dilakukan oleh Zhao *et al.* (2021). Penelitian ini menggunakan 24,704 data sampel perusahaan dari tahun 2010-2018 yang merupakan perusahaan A-Share (perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Shanghai atau Shenzhen) yang terdaftar di China Stock Market and Accounting Research (CSMAR) sebagai subjek penelitian. Pada penelitian ini *Corporate Fraud* sebagai variabel dependen diukur dengan menggunakan dua variabel *dummy* yaitu (Fraud), dimana kode 1 jika perusahaan terlibat dalam 1 atau lebih kasus *fraud* dalam satu

tahun dan kode 0 sebaliknya. Variabel *dummy* (Fre) yaitu total perusahaan terlibat kasus *fraud* dalam satu tahun (khususnya kasus *fraud* pengungkapan, operasi, dan leader). Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Multiple Large Shareholders* yang diukur menggunakan variabel *dummy*, kode 1 jika perusahaan memiliki 2 atau lebih pemegang saham besar dengan kepemilikan lebih dari 10% dalam setahun, kode 0 sebaliknya. Dalam penelitian ini juga terdapat variabel moderasi, variabel mediasi, dan variabel kontrol. Variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu Pemisahan Hak Arus Kas dari Hak Kendali yang diukur dari perbedaan hak arus kas dan hak kendali dibagi hak kendali. Variabel mediasi dalam penelitian ini yaitu Asimetri Informasi yang diukur menggunakan dispersi perkiraan analis dan *Capital Occupation* yang diukur dengan rasio piutang lain-lain dibagi total aktiva. Variabel kontrol dalam penelitian ini terdiri dari Ukuran Perusahaan yaitu rasio total aset, *Leverage* yaitu rasio utang, Profitabilitas Perusahaan yaitu rasio pengembalian aset, Big10 yaitu perusahaan diaudit oleh KAP top 10 yang terdaftar di Chinese Institute of Certified Public Accountants (CICPA), Jumlah Analis, Ukuran Dewan Direksi, Dual yaitu CEO juga memiliki jabatan sebagai ketua dewan direksi, Turnover Saham yaitu rata-rata rasio total turnover saham harian. Pengujian hipotesis menggunakan 2 metode *logit fixed effect model* untuk menguji pengaruh *multiple large shareholders* terhadap kecenderungan *corporate fraud*. *Poisson fixed effect model* untuk menguji pengaruh *multiple large shareholders* terhadap frekuensi *corporate fraud*. Hasil dari penelitian ini adalah *multiple large shareholders* berpengaruh negatif terhadap *corporate fraud* (Kehadiran MLS mengurangi terjadinya kemungkinan dan frekuensi *corporate fraud*).

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Gam <i>et al.</i> (2021)	<i>evasive shareholder meetings and corporate fraud</i>	<p>Variabel Dependen: <i>Corporate Fraud</i> diukur dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan <i>fraud</i>. Kemudian dikategorikan kedalam tiga ukuran sanksi yaitu perintah koreksi, pengenaan denda, dan penuntutan dilihat dari tingkat keparahannya.</p> <p>Variabel Independen: <i>Evasive Shareholder Meeting</i> yang diukur dengan menggunakan variabel <i>dummy</i>. Pengukuran ini membagi perusahaan kedalam dua kategori yaitu <i>cluster 1</i> dan <i>switcher</i>.</p> <p>Variabel Kontrol: Ukuran Perusahaan yang diukur</p>	<i>Evasive shareholder meetings</i> berpengaruh positif terhadap kemungkinan terjadinya <i>corporate fraud</i> .

			<p>menggunakan rasio total aset, <i>Leverage</i> diukur menggunakan rasio utang, Profitabilitas Perusahaan yaitu rasio pengembalian aset, Umur Perusahaan diukur menggunakan jumlah tahun sejak perusahaan didirikan, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Terbesar, <i>Market Share</i>, <i>Tobin's Q</i>, dan Indikator ADR.</p>	
--	--	--	--	--

2.	Zhao <i>et al.</i> (2021)	<i>Multiple large shareholders and corporate fraud: evidence from China</i>	<p>Variabel Dependen: <i>Corporate Fraud</i> diukur menggunakan dua variabel <i>dummy</i> yaitu (<i>Fraud</i>), dimana kode 1 jika perusahaan terlibat dalam 1 atau lebih kasus <i>fraud</i> dalam satu tahun dan kode 0 sebaliknya. Variabel <i>dummy</i> (<i>Fre</i>) yaitu total perusahaan terlibat kasus <i>fraud</i> dalam satu tahun (khususnya kasus <i>fraud</i> pengungkapan, operasi, dan <i>leader</i>).</p> <p>Variabel Independen: <i>Multiple Large Shareholders</i> yang diukur menggunakan variabel <i>dummy</i>, kode 1 jika perusahaan memiliki 2 atau lebih pemegang saham besar dengan kepemilikan lebih dari 10% dalam setahun, kode 0 sebaliknya.</p>	<p><i>Multiple large shareholder</i> berpengaruh negatif terhadap <i>corporate fraud</i>.</p> <p>Saat pemisahan hak arus kas dan hak kendali pemegang saham pengendali lebih besar, pengaruh negatif MLS terhadap <i>corporate fraud</i> semakin terlihat.</p>
----	---------------------------	---	--	--

			<p>Variabel Moderasi: Pemisahan Hak Arus Kas dari Hak Kendali yang diukur dari perbedaan hak arus kas dan hak kendali dibagi hak kendali.</p> <p>Variabel Mediasi: Asimetri Informasi yang diukur menggunakan dispersi perkiraan analis dan <i>Capital Occupation</i> yang diukur dengan rasio piutang lain-lain dibagi total aktiva.</p> <p>Variabel Kontrol: Ukuran Perusahaan yaitu rasio total aset, <i>Leverage</i> yaitu rasio utang, Profitabilitas Perusahaan yaitu rasio pengembalian aset, <i>Big10</i> yaitu perusahaan diaudit oleh KAP top 10 yang terdaftar di <i>Chinese Institute of Certified Public Accountants</i> (CICPA), Jumlah Analis, Ukuran</p>	
--	--	--	---	--

			Dewan Direksi, Dual yaitu CEO juga memiliki jabatan sebagai ketua dewan direksi, Turnover Saham yaitu rata-rata rasio total <i>turnover</i> saham harian.	
--	--	--	---	--

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh *Evasive Shareholder Meetings* terhadap *Corporate Fraud*

Manajemen yang ingin menyembunyikan *fraud* akan melakukan berbagai cara untuk menghindari dan mencegah pemegang saham mengetahui informasi tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan *evasive shareholder meetings*. Sifat RUPST yang berbentuk wajib, membuat manajemen menetapkan strategi penjadwalan RUPST yang menguntungkan dirinya dan secara efektif dapat menghindari pemegang saham (Gam *et al.*, 2021). Strategi penghindaran RUPST ini dapat menggunakan tanggal, bulan, dan waktu populer, serta keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki pemegang saham (individu atau institusional) untuk dapat berpartisipasi dalam RUPST (Gam *et al.*, 2021). Menurut Gam *et al.*, (2021), manajemen yang ingin menggunakan suatu proyek untuk mendapatkan keuntungan pribadi, akan memiliki insentif untuk menyembunyikan informasi ini dari pemegang saham. Sehingga, dapat disimpulkan jika perusahaan melakukan strategi penghindaran RUPST maka kemungkinan terjadinya *corporate fraud* semakin meningkat. Hipotesis ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gam *et al.* (2021).

H_{A1}: *Evasive Shareholder Meetings* berpengaruh positif terhadap *Corporate Fraud*.

2.9.2 Pengaruh *Multiple Large Shareholders* terhadap *Corporate Fraud*

Konflik kepentingan diantara pemegang saham akibat dari struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, merupakan masalah yang merugikan tidak hanya perusahaan namun juga pemegang saham minoritas. Kedudukan yang dimiliki pemegang saham pengendali, dapat mempengaruhi proses tata kelola perusahaan. Pemegang saham pengendali akan lebih cenderung mementingkan keuntungannya dengan memanfaatkan hak suara yang dimiliki untuk mengendalikan keputusan bisnis perusahaan. Ketika pemegang saham pengendali memutuskan untuk melakukan *tunneling*, *fraud* tidak dapat dihindari. Pemegang saham minoritas yang dirugikan tidak dapat melindungi investasinya dari praktik *fraud* yang dilakukan.

Permasalahan kekuasaan yang dimiliki pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali dapat diminimalisir dengan keberadaan *multiple large shareholders* (MLS). Sebagai pemegang saham dengan kepemilikan substansial (Adelopo *et al.*, 2019), MLS dapat mengawasi aktivitas pemegang saham pengendali dan manajemen perusahaan (Zhao *et al.*, 2021). Keberadaan MLS di perusahaan membawa kekuatan tawar menawar dan meningkatkan kebutuhan akan pengawasan atas investasi di perusahaan (Attig *et al.*, 2013). MLS yang memiliki persentase kepemilikan diatas 10% akan memunculkan persaingan antara MLS dan pemegang saham pengendali untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di perusahaan. Persaingan tersebut akan meningkatkan efisiensi pengawasan di perusahaan (Boateng dan Huang, 2017) dan mengecilkan kemungkinan terjadinya

corporate fraud. Hipotesis ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Zhao *et al.* (2021).

H_{A2}: Multiple Large Shareholders berpengaruh negatif terhadap Corporate Fraud.

